

No. 181 April 2021

www.baktinews.bakti.or.id

BaktiNews

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



RASIONALISASI PERENCANAAN:
PERSPEKTIF DAERAH

MEREKA YANG TIDAK TERCATAT:
**RAPUHNYA PONDASI PENCATATAN SIPIL
DI INDONESIA**

**DANA DESA UNTUK PELESTARIAN
LINGKUNGAN DI PAPUA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAE**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAE**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

April 2021

No. 182

- 1** Rasionalisasi Perencanaan:
Perspektif Daerah
Oleh **ABDUL MADJID SALLATU**
- 4** Satu Data Untuk
Pembangunan Papua
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 9** Siklon Tropis Seroja Mungkin
akan Hantam Indonesia Tiap
Tahun, Tapi Belum
Dimasukkan Kluster Bencana
Oleh **JONATAN LASSA**
- 13** Pengurangan Risiko Bencana
Ada di Ujung Jari Kita:
Transformasi Digital
Mencegah Korban Jiwa
Oleh **SOPHIE KEMKHADZE**
- 17** Empat Strategi untuk
Ekonomi Biru di Indonesia
Oleh **DAVID KACZAN & ANDRÉ
RODRIGUES DE AQUINO**
- 21** Bendera Penyelamat Ibu &
Anak Sinoa
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 25** Mengkomunikasikan
Perlindungan Sosial di Papua
Barat
Oleh **LUNA VIDYA MATULESSY**
- 29** Mereka yang Tidak Tercatat:
Rapuhnya Pondasi Pencatatan
Sipil di Indonesia
Oleh **TIM PUSKAPA**
- 33** Dana Desa untuk Pelestarian
Lingkungan di Papua
Oleh **WAHYUDIN OPU**
- 38** Korupsi dan Pemimpin Miskin
Integritas
Oleh **HERMAN HEIZER**
- 40** Diskusi *Online Live* di
Instagram Story @infobakti
- 41** Batukarinfo.com

■ Foto Cover : **Yusuf Ahmad /KOMPAK**

Selamat Hari Raya

Idulfitri

1 Syawal 1442 H

Mohon Maaf, Lahir & Batin



RASIONALISASI PERENCANAAN: PERSPEKTIF DAERAH

Oleh **ABDUL MADJID SALLATU**

S

etiap membawakan materi pelatihan tentang sistem perencanaan pembangunan, saya memilih kalimat pembuka dengan mengajukan pertanyaan "Masih adakah yang disebut dengan ilmu atau teori perencanaan pembangunan?". Saya membiarkan keadaan kelas hening sejenak, tetapi tidak menunggu ada jawaban ataupun tanggapan dari para peserta di kelas, lalu menjawabnya sendiri. "Tidak ada lagi, mengapa?". Oleh karena sudah sejak lama konsep-konsep pemikiran dan peralatan teori perencanaan pembangunan sudah ditransformasikan ke dalam baik undang-undang maupun peraturan penjabarannya. Sejak zaman orde baru, ada yang dikenal dengan P5D, yang dikembangkan terus sampai saat ini mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai kepada penjabaran teknisnya dalam bentuk peraturan dan surat edaran menteri.

Diklat perencanaan pembangunan lebih diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis para perencana, termasuk dalam memahami ketentuan peraturan dan edaran yang berlaku, yang juga secara dinamis berubah dan berkembang. Gayung bersambut, para peserta Diklat pun lebih tertarik dan menaruh perhatian pada pemahaman teknis perencanaan pembangunan. Oleh karena itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi kesehariannya, baik sebelum maupun sesudah mengikuti diklat. Demikian pulalah pemaknaan tenaga fungsional perencana yang difasilitasi dengan tunjangan, menjadi tidak jelas apa maknanya. Menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian pelembagaan diklat perencanaan pembangunan dibutuhkan, karena nampaknya memang hanya diadakan terutama untuk perencana daerah?

Dalam banyak realitas, DPRD sudah merupakan instansi perencanaan yang atas nama fungsi yang diembannya bahkan cenderung bisa memveto substansi perencanaan atas nama aspirasi Dapil termasuk dukungan pendanaannya.

Sebenarnya untuk dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis, setiap instansi perencana bisa melakukan sendiri secara mandiri dengan bantuan mentor. Bisa melibatkan lebih banyak tenaga perencana, lebih efektif memanfaatkan jam kerja dan lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya pendanaan. Kekurangannya adalah tidak bersertifikat, yang dikeluarkan oleh lembaga diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan jenjang sebagai tenaga fungsional.

Saat memberikan materi pun saya ungkapkan bahwa saya tidak percaya seratus persen pada diklat perencanaan karena sebenarnya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang lebih efektif adalah dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Apalagi tidak mustahil dalam setiap instansi perencanaan ada yang mampu berperan sebagai *coach*, terutama staf perencana yang telah memiliki kepangkatan dan pengalaman yang lebih senior atau lebih tinggi. Hal ini yang masih kurang diperhatikan oleh lembaga pembina tenaga perencana, semisal BAPPENAS.

Diklat yang dikembangkan kurang lebih hanya merupakan kegiatan proyek.

Belum lagi untuk mempertimbangkan setidaknya dua hal. Pertama, apresiasi terhadap hasil kerja tenaga perencana di suatu instansi ataupun daerah masih cukup rendah. Tenaga perencana sangat terbatas ruangnya untuk melakukan *exercise* perencanaan, bahkan lebih cenderung sekedar merumuskan perencanaan sesuai arahan pimpinan instansi atau pimpinan daerah dan sesuai dengan arahan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kedua, *exercise* perencanaan semakin kerdil lagi, karena harus berhadapan dengan lembaga DPRD yang memiliki kepentingan subjektif dalam hal substansi perencanaan dan pada saat mengonsultasikan dokumen perencanaan ke pemerintah. Dalam banyak realitas, DPRD sudah merupakan instansi perencanaan yang atas nama fungsi yang diembannya bahkan cenderung bisa memveto substansi perencanaan atas nama aspirasi Dapil termasuk dukungan pendanaannya. Di tingkat pemerintah pun demikian, bila dalam perencanaan ada semacam kreasi daerah yang tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang telah diaturnya hanya saja lebih terfokus pada substansi kepentingan pembangunan nasional.

Hal lainnya lagi, instansi perencanaan, baik pusat maupun daerah, tidak memiliki domain kebijakan dalam hal penganggaran. Dalam hal penganggaran, domain berada pada instansi yang lain dan juga DPRD. Eksistensi instansi perencanaan menjadi kurang berani dan, lebih cenderung tampil sebagai instansi 'tukang' susun rencana belaka.

Berita tentang seorang Kepala BAPPEDA diusir dari ruang sidang DPRD belum lama ini merupakan hal yang lumrah saja. BAPPEDA menjadi semacam instansi pelengkap saja. Berita mutakhir lain, APBD yang baru berusia beberapa bulan akan *direfocusing* karena utang yang cukup besar jumlahnya, sungguh-sungguh lucu perencanaan. Menjadi tanda tanya, lalu apa yang dilakukan dalam proses perencanaan sebelumnya. APBD telah diperlakukan semena-mena, seenaknya. Validitas dan akuntabilitas

Lucunya, kinerja pembangunan yang lebih banyak dikontribusikan oleh sektor swasta, justru diklaim seolah-olah merupakan hasil dari pada perencanaan pembangunan, misalnya pertumbuhan ekonomi.

proses penyusunannya sangat tidak bertanggung jawab. Masyarakat luas mungkin dianggap sudah teralu bodoh.

Semua realitas di atas menjadi sungguh merupakan ironi. Tetapi mengapa semua itu menjadi kenyataan? Nampaknya manajemen publik yang berkembang sampai saat ini masih menggunakan prinsip manajemen abad XX, yaitu *intolerance of risk*, tidak ada toleransi bagi kesalahan. Dalam kaitan ini, perencanaan dan rencana pembangunan menjadi semacam keranjang sampah intoleransi tersebut. Semua harus termuat dalam dokumen perencanaan dan rencana pembangunan.

Akibatnya dokumen perencanaan menjadi sangat tambun. Realitasnya memang menjadi sumber penyakit, karena korupsi tetap saja terjadi setiap tahun anggaran. Kita bisa membayangkan sistem perencanaan komando yang ada di negara sosialis-komunis, semua substansi rencana harus tertera dalam dokumen sebagai sebuah cetak biru pembangunan.

Kita patut mempertanyakan apa sebenarnya makna perencanaan pembangunan, demikian pula keberadaan kelembagaan BAPPEDA? Seputar akhir era orde baru, perencanaan sudah dikatakan bukan lagi cetak biru pembangunan. Masuk ke era reformasi, dikenal hadirnya visi yang akan menuntun pembangunan, namun sampai detik ini masih lebih merupakan jargon pembangunan belaka, apalagi karena tidak terukur. Inilah yang melemahkan keberadaan

perencanaan pembangunan, karena kehilangan fokus. Bisa dicermati dalam dokumen perencanaan pembangunan, betapa sangat banyak yang ingin dicapai tetapi betapa sangat sedikit yang mampu direalisasikan. Lucunya, kinerja pembangunan yang lebih banyak dikontribusikan oleh sektor swasta, justru diklaim seolah-olah merupakan hasil dari pada perencanaan pembangunan, misalnya pertumbuhan ekonomi. Padahal belum tentu tenaga perencana BAPPEDA sendiri paham bagaimana proses dan penciptaan pertumbuhan ekonomi itu.

Lebih menarik lagi karena uji sah perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA bukan dilakukan oleh BAPPENAS melainkan Kemendagri. Namun sangat amat menentukan dalam menguji dokumen perencanaan yang bahkan sudah melalui dan lolos dari pembahasan DPRD. Keanehan yang juga melekat disitu, karena lebih sering daerah dianggap tidak paham bagaimana mengalokasikan anggaran yang sepatutnya. Sulit disangkal bahwa telah terjadi pembiasaan yang terstruktur dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam kaitan ini, BAPPEDA tidak bisa banyak berkutik.

Suka atau tidak, mulai dari proses sampai terbentuknya dokumen perencanaan pembangunan, dari uraian di atas, sejumlah hal yang tidak rasional telah terjadi dan menjadi realitas. Realitas ini patut dicermati kembali. Dokumen perencanaan adalah penunjuk arah perkembangan ke depan, bukan trailer substansi kegiatan yang ingin dilaksanakan, bukan cetak biru yang bersifat komando. Nampaknya pemahaman dan pengasaan seorang kepala daerah menjadi hal yang sangat esensial untuk melakukan rasionalisasi perencanaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com



Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II/Yayasan BaKTI

SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN PAPUA

Oleh **HALIA ASRIYANI**

D

esa diamanatkan untuk memiliki sistem informasi dan data yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah (kabupaten/kota) berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan



Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II/Yayasan BaKTI

pembangunan kawasan. Kewajiban yang melekat pada kabupaten/kota ini bertujuan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan berbasis pada data yang lengkap dan akurat. Sistem informasi desa dalam hal ini juga mengandung maksud bukan sebatas aplikasi, melainkan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia terutama kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai penggerak sistem informasi dan data ini.

Amanat ini pun sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengembangkan kampung digital yang merupakan kerjasama antar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kampung digital, dapat memberi ruang kepada masyarakat desa untuk mempromosikan potensi dan pengelolaan data yang lebih informatif. Tidak dapat kita pungkiri,

keberadaan sistem data memang berperan penting dalam mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah. Pemerintah Papua sendiri, telah mulai mengupayakan pelaksanaan pengelolaan pembangunan berbasis elektronik dari penggunaan *e-planning* dan *e-budgeting*.

KOMPAK-LANDASAN Fase II melalui program Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang telah dijalankan sejak tahun 2017, telah menguji coba perencanaan kampung berbasis data di empat kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten tersebut adalah Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel. Pengelolaan data penduduk kampung tersebut dilakukan oleh pemerintah kampung dengan dibantu oleh kader kampung. Proses penyiapannya diawali dengan pembentukan basis data kampung. Pada tahap ini kader kampung melakukan pengumpulan data secara langsung pada masyarakat kampung dan dilanjutkan dengan penginputan data ke dalam aplikasi. Data yang telah tersedia pun selanjutnya



Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II/Yayasan BaKTI

dapat dipilah dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan seperti dalam perencanaan kampung. Pada forum perencanaan kampung, data-data ini dapat disajikan dan digunakan untuk menganalisa kondisi serta memutuskan kegiatan-kegiatan prioritas kampung.

Selain menjadi basis data, SAIK juga dimanfaatkan sebagai alat administrasi untuk mengurus surat-surat kependudukan di tingkat kampung. Dampaknya, dengan menggunakan SAIK bisa dengan cepat diketahui kepala keluarga mana saja yang belum memiliki surat-surat kependudukan seperti KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Data dalam SAIK juga selalu terbaru sejalan dengan jumlah jiwa (kelahiran ataupun kematian yang terjadi di kampung tersebut) yang membuat data di SAIK bisa menjadi basis data yang dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengetahui sebuah daerah, maupun bagi pemerintah kampung untuk menyusun program-program pengembangan kampung dalam rancangan pembangunan kampung.

Pada 2019, SAIK ini kemudian mengalami pemutakhiran dan hadir dengan nama baru yaitu Sistem Informasi Orang Papua (SIO PAPUA). Pada SIO PAPUA, terdapat penyesuaian sistem yang ada dengan teknologi saat ini. Hal tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan SIO PAPUA dengan sistem informasi elektronik lainnya di daerah dan memungkinkan pemerintah daerah untuk memodifikasi fitur aplikasi sesuai kebutuhan daerah di masa yang akan datang. Selain itu terdapat penambahan variabel data yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, terutama untuk agregasi data Orang Asli Papua (OAP). Pembuatan aplikasi SIO PAPUA pun dirancang agar lebih *user-friendly* dan dapat diaplikasikan melalui telepon genggam.

Melalui SIO PAPUA, upaya mewujudkan pembangunan berbasis data ini telah menunjukkan hasil di Papua, khususnya di wilayah dampingan program KOMPAK-LANDASAN Fase II. Pada Januari 2021. Sebanyak 57 kampung telah melakukan pendataan



Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II/Yayasan BaKTI

“Tidak optimalnya kebijakan pembangunan daerah boleh jadi karena kesimpangsiuran data yang dimiliki. Data yang sudah dibuat dari KOMPAK-LANDASAN ini akurat karena melakukan pendataan secara langsung serta memuat informasi-informasi mendasar tentang wilayah dan kondisi masyarakat, kalau ini kita perluas ke wilayah lainnya dan terintegrasi dan tersinkronisasi dengan sistem di kabupaten, kita bisa maksimalkan pembangunan dan fokus pada permasalahan.”

kependudukan dari estimasi 15.252 Kepala Keluarga (KK). Terdiri dari 26 Kampung melakukan pendataan sebanyak 9.282 KK dan 10 kampung melakukan penginputan mencapai 4.757 KK. Sementara itu, kampung-kampung lain masih berlanjut pendataan dan penginputan. Di masa pandemi COVID-19, data SIO PAPUA yang telah tersedia pun juga digunakan di sejumlah kampung sebagai salah satu acuan untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial COVID-19.

Di dalam proses penyiapan dan pemanfaatan data SIO PAPUA ini, KOMPAK-LANDASAN Fase II juga menyadari bahwa pemanfaatan data dalam berbagai kebutuhan dan program pembangunan bukan hanya dibutuhkan di tingkat kampung melainkan juga di distrik maupun kabupaten. Untuk itu, maka pengintegrasian dan sinkronisasi data SIO PAPUA dengan sistem data dan informasi lainnya di tingkat kabupaten menjadi penting dilakukan. Pengintegrasian dan sinkronisasi data dari semua sistem data dapat dijadikan pintu

masuk untuk membangun sistem satu data dalam kabupaten yang terintegrasi dan tersinkronisasi mulai dari kampung, distrik hingga tingkat kabupaten. Dengan begitu akan menghasilkan kesatuan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan antar instansi pusat dan instansi daerah. Kesatuan data ini tentu akan memberi manfaat besar dalam memastikan pembangunan suatu wilayah di berbagai sektor dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Menindaklanjuti hal tersebut, kegiatan Lokakarya Pengintegrasian Data SIO PAPUA dengan Sistem Data Kabupaten dilakukan di empat kabupaten dampingan program KOMPAK-LANDASAN Fase II di Provinsi Papua yaitu Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah OPD terkait di antaranya Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan perwakilan dari distrik yang terlibat.

Joseph P. Seumahu, seorang fasilitator Lokakarya Pengintegrasian Data dari KOMPAK-LANDASAN mengungkapkan pentingnya integrasi data. “Tidak optimalnya kebijakan pembangunan daerah boleh jadi karena kesimpangsiuran data yang dimiliki. Data yang sudah dibuat dari KOMPAK-LANDASAN ini akurat karena melakukan pendataan secara langsung serta memuat informasi-informasi mendasar tentang wilayah dan kondisi masyarakat, kalau ini kita perluas ke wilayah lainnya dan terintegrasi dan tersinkronisasi dengan sistem di kabupaten, kita bisa maksimalkan pembangunan dan fokus pada permasalahan.”

Satu data adalah salah satu topik yang dibahas dalam lokakarya pengintegrasian data. Mulai dari menyepakati sistem/aplikasi data, proses pendataan, pemutakhiran data, pengolahan dan analisa data serta pengembangan dan pemeliharaan aplikasi tiap kabupaten. Selain itu, penanggungjawab untuk menjalankan tugas dan fungsi ini, seperti mengelola dan merawat sistem/aplikasi serta pemanfaatan data yang telah dianalisis untuk

kepentingan pembangunan. Lebih lanjut, lokakarya dengan inisiatif satu data ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk dapat mengidentifikasi para pihak, prosedur, regulasi dan anggaran guna menjamin keberlanjutan data kampung melalui kader kampung maupun SIO PAPUA.

“Di Nabire, Dukcapil mencatat jumlah penduduk kita mencapai 25 ribu jiwa. Pembangunan kita harus mencakup semua jumlah itu. Untuk itu, kita butuh data.” Ungkap Barnabas Watopa, Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire pada kegiatan lokakarya pengintegrasian data yang dilakukan di Kabupaten Nabire pada akhir Maret 2021 lalu. Menyadari pentingnya data, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire sendiri berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi data SIO PAPUA dengan data SIAK yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Lokakarya ini menghasilkan komitmen pemerintah akan sistem satu data di kabupaten dan rencana tindak lanjut penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran dan sumber daya oleh OPD teknis terhadap pelaksanaan SIO PAPUA di kabupaten, sekaligus pelembagaan SIO PAPUA beserta kader kampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem satu data ini.

Keberlanjutan SIO PAPUA sangat tergantung kepada pemerintah daerah tentang komitmen regulasi, pengalokasian anggaran dan sumber daya pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait mulai tahun anggaran 2021. Komitmen ini juga akan memastikan keberlanjutan kader kampung, ketersediaan data, maupun beroperasinya SIO PAPUA sebagai sistem informasi pemerintah daerah pada OPD teknis terkait. Dengan menghadirkan sistem data SIO PAPUA dan pengintegrasian dengan sistem data lainnya di kabupaten yang dilakukan di wilayah dampingan program KOMPAK-LANDASAN ini diharapkan dapat menjadi peluang besar untuk pembangunan berbasis data di seluruh wilayah Provinsi Papua.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Siklon Tropis Seroja Mungkin Akan Hantam Indonesia Tiap Tahun, Tapi Belum Dimasukkan Kluster Bencana

Oleh **JONATAN LASSA**

S

iklon tropis Seroja yang menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur dan perairan sekitarnya pada 4 April telah menyebabkan topan, banjir bandang, dan longsor di sejumlah kabupaten di sana.

Setidaknya, hingga 8 April, siklon atau angin puting beliung kencang itu secara tidak langsung menyebabkan 163 orang meninggal dan puluhan ribu rumah dan bangunan rusak berat. Jaringan listrik dan komunikasi terputus hingga saat ini.



Foto dari udara dampak siklon menggambarkan kerusakan akibat banjir bandang di Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), 6 April 2021.

Foto: **ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.**

Belum ada sistem peringatan dini yang efektif terkait siklon tropis di Indonesia.

Dampaknya, pemerintah daerah, masyarakat di pesisir dan media tidak memiliki informasi yang cukup memadai untuk mengetahui risiko datangnya siklon.

Pemerintah perlu segera memasukkan siklon tropis dalam kategori bencana dan memperbarui standar bangunan rumah dan bangunan yang tahan terhadap kecepatan angin siklon. Sistem peringatan dini juga sangat dibutuhkan masyarakat.

Karakter Siklon Tropis

Siklon tropis terbentuk dari segumpulan badai petir yang dapat berkembang di atas lautan tropis yang hangat. Dengan kondisi yang tepat, gugusan awan dan badai dapat berkembang menjadi siklon.

Manakala suhu lautan makin hangat, ia bertindak sebagai bahan bakarnya, menghasilkan energi dalam jumlah besar saat awan terbentuk.

Salah satu ancaman utama dari siklon tropis adalah kecepatan aliran angin yang mengalir atau berputar.

Siklon Kategori 1, kecepatan aliran angin di mata siklonnya bisa melebihi 125 km per jam. Kekuatan ini, dengan diameter mata siklon mencapai 40 km, dengan gampang merobohkan sebagian besar pohon dan dapat mencelakai orang, menghancurkan rumah dan harta benda dalam skala besar.

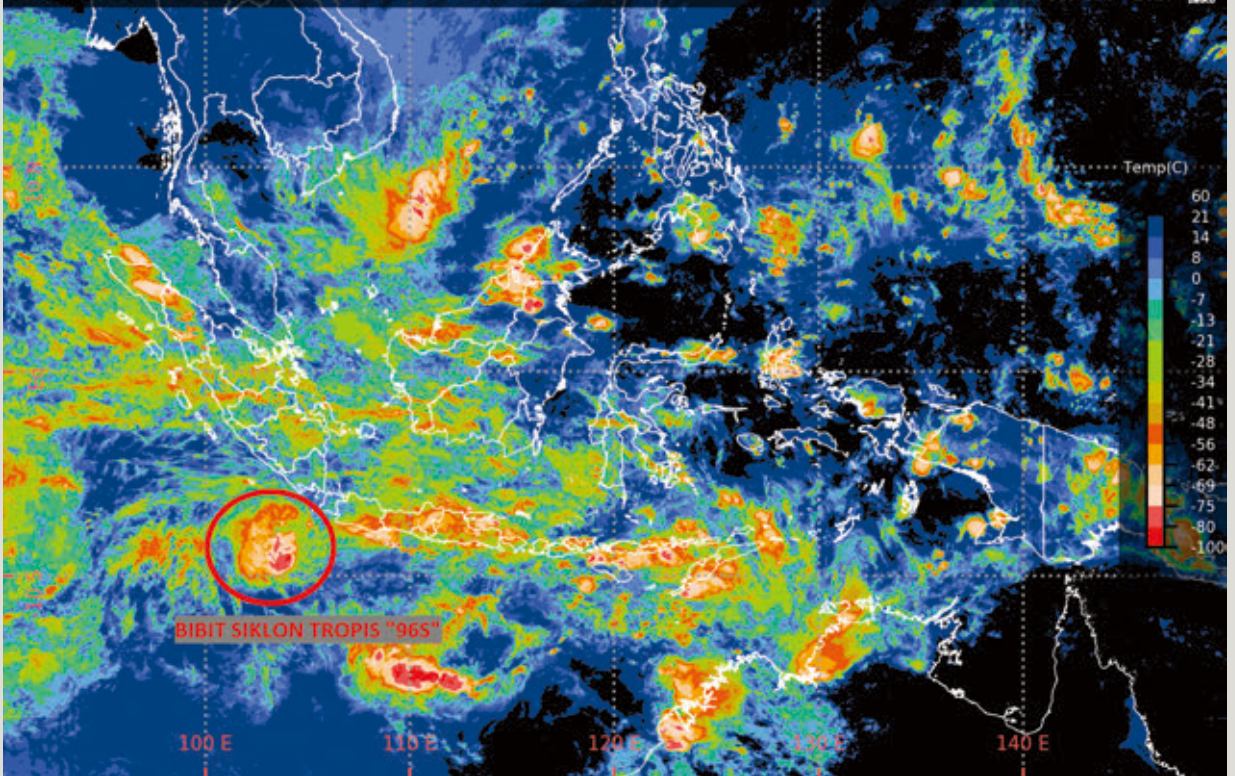
Kerusakan lebih parah bisa terjadi jika kecepatan aliran angin masuk kategori 2 (antara 125-164 km per jam) dan kategori 3 (165-224 km per jam). Selain kekuatan angin, siklon tropis akan datang dengan curah hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor.

Tak Ada Sistem Peringatan Dini

Jika kita bandingkan dengan Australia, negara di seberang Nusa Tenggara Timur, peringatan dini dan informasi siklon di Negeri Kanguru itu cukup memadai.

Walau Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia sudah mengenal siklon tropis dalam layanan peringatan dini berbasis prediksi setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir, dalam sistem formal peringatan dini BMKG, siklon tropis belum mendapatkan porsi memadai.

Link website BMKG yang konsisten dan stabil terkait siklon tropis juga belum terlihat. Dalam *database* bencana Indonesia (DIBI), siklon tropis tidak dikenal. Semua *database* kerusakan akibat bencana siklon tropis tidak teridentifikasi.

Foto: <https://www.bmkg.go.id>

Di utara Australia, masyarakat mengenal musim siklon. Untuk tahun 2020-2021, pemerintah di sana menetapkan musim siklon mulai November 2020 hingga April 2021.

Dalam kasus siklon terakhir, media-media Australia aktif memberitakan potensi siklon tropis di perairan Laut Timor sejak akhir Maret 2021 berdasarkan indikasi terbentuknya bibit siklon.

Di Indonesia, khususnya di NTT, dalam lima tahun terakhir media lokal aktif memberitakan informasi dari BMKG bila terbentuk bibit siklon di Laut Timor atau di Laut Banda. Namun, dalam kasus Seroja media-media Indonesia baru memberitakan pada 3 April, sehari sebelum kedatangan siklon.

Banyak lembaga, termasuk Badan Meteorologi Australia, telah memprediksi bahwa fenomena *La Nina*, yang menyebabkan curah hujan lebih besar dan ekstrem, masih berlangsung. *La Nina* membuat potensi kejadian siklon tropis bukan hanya lebih tinggi tapi juga ada kecenderungan jelajah yang lebih panjang dibanding masa-masa normal.

Ini menunjukkan sangat mendesak bagi Indonesia untuk memiliki sistem peringatan dini yang efektif terkait siklon tropis.

Jakarta Tropical Cyclone Warning Center memiliki fasilitas yang minim untuk peringatan dini yang efektif. BMKG perlu memperbarui teknologi, termasuk pengelolaan situs daring dan kualitas informasi peringatan dini yang lebih mudah disebarkan dan gampang dimengerti oleh lembaga-lembaga di daerah dan masyarakat awam.

Mitigasi Siklon Tropis dan Adaptasi Iklim

Sejauh ini, Indonesia masih merespons risiko siklon secara parsial. Misalnya, kita memahami banjir, longsor, dan badai sebagai hal yang terpisah dari siklon tropis. Padahal, semua hal tersebut merupakan wujud dari dampak siklon tropis.

Karakter klimatologis siklon tropis berwujud dalam curah hujan ekstrem, perubahan suhu dan kecepatan angin ekstrem yang relatif panjang di laut, pantai dan daratan.

Sedangkan karakter hidrologisnya bisa kita saksikan dalam wujud genangan ekstrem, banjir, banjir bandang, banjir rob, dan longsor. Kombinasi dari semua karakter lebih berpotensi mematikan dan menghancurkan pencapaian-pencapaian pembangunan yang dibangun dalam skala dekade, seperti di Nusa Tenggara Timur pekan ini.



Foto: Twitter/@KakaBuche

Langkah Mitigasi Risiko

Siklon merupakan fenomena alam yang hampir mustahil bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah menyusun kebijakan dan mendorong perilaku yang bisa mengurangi risiko menjadi korban.

Kementerian Pekerjaan Umum perlu memperbarui standar bangunan, khususnya untuk pembebanan dinding dan atap rumah. Sejauh ini kekuatan angin maksimum yang ada dalam standar bangunan yang dipakai di daerah masih jauh dari Siklon Kategori 1 yang dapat mencapai 100 km per jam.

Misalnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 1727/2013 mengatur aturan pembebanan atap dan struktur lainnya dengan kekuatan angin sekitar 70 km per jam. Kekuatan di atas ini, sekadar diserahkan ke pihak arsitek dan insinyur sipil.

Sedangkan revisinya (SNI 1727/2020) baru diterbitkan pada 2020. Walau belum sensitif pada variasi karakter siklon tropis, revisi ini mulai memperhitungkan 'wilayah rawan topan' yang punya peluang terdampak kecepatan angin dasar di atas 185 km per jam. Isinya masih perlu di pahami oleh para pelaku konstruksi.

Sejauh ini, Indonesia masih merespons risiko siklon secara parsial. Misalnya, kita memahami banjir, longsor, dan badai sebagai hal yang terpisah dari siklon tropis. Padahal, semua hal tersebut merupakan wujud dari dampak siklon tropis

Namun, mitigasi bukan hanya soal keamanan gedung dan bangunan semata. Atap dan sampah-sampah rumah tangga yang terbang dapat menghancurkan kehidupan yang dihantamnya.

Di Australia Utara, masyarakat memiliki budaya kelola siklon, termasuk setiap tahun membersihkan material yang mudah terbang sebelum memasuki musim siklon. Hal ini bertalian erat dengan jasa layanan pengelolaan sampah pemerintah daerah yang harus dibangun serius.

Perusahaan telekomunikasi dan listrik perlu mendesain ulang pemasangan infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan seperti tiang dan kabel agar terhindar dari hantaman kekuatan badai. Sebaiknya jaringan kabel diletakkan di bawah tanah. Tata kota termasuk tata taman maupun vegetasi di perumahan wajib memperhitungkan potensi roboh pohon pada bangunan rumah.

Sejatinya dalam lima puluh tahun ini tiap tahun di selatan Indonesia berpotensi menjadi lintasan siklon. Perubahan iklim menyebabkan menghangatnya sebagian lautan di daerah dekat tropis/subtropis. Implikasinya, Laut Timor dan Laut Banda berpotensi menjadi tempat perkembangbiakkan baru siklon tropis dan berpotensi terjadi tahunan.

Saatnya kita bersiap menghadapi siklon tropis yang mungkin akan terjadi setiap tahun.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Senior Lecturer in Humanitarian, Emergency and Disaster Management Charles Darwin University. Artikel bersumber dari The Conversation Edisi Indonesia dan dapat diakses pada link berikut. <https://theconversation.com/siklon-tropis-seroja-mungkin-akan-hantam-indonesia-tiap-tahun-tapi-belum-dimasukkan-kluster-bencana-158619>



Informasi dapat mencegah jatuhnya korban jiwa. Mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana membuat perbedaan.

Pada tahun 2004, penduduk Pulau Simeulue, di lepas pantai selatan Sumatera, merasakan gempa, melihat air laut surut, dan mengetahui berdasarkan kearifan lokal bahwa tsunami akan datang dan mereka melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Pengetahuan telah menyelamatkan nyawa mereka.

Sejak bencana tersebut, Indonesia telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan mitra lokal untuk menanggulangi bencana dan membangun sistem peringatan dini nasional. Masyarakat di seluruh Indonesia sekarang tahu langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi bencana dan siswa sekolah dan penduduk desa telah melakukan latihan kesiapsiagaan bencana di sekolah dan desa masing-masing.

Ini adalah contoh pengurangan risiko bencana; menyiapkan berbagai kerangka pengaman untuk berbagai risiko bencana yang dihadapi Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengurangi potensi kerugian. Ketika bencana seperti gempa bumi, tsunami, badai, penyakit melanda, akses ke informasi mencegah jatuhnya korban jiwa.



PENGURANGAN RISIKO BENCANA ADA DI UJUNG JARI KITA: **TRANSFORMASI DIGITAL MENCEGAH KORBAN JIWA**

Oleh **SOPHIE KEMKHADZE**



Dan hari ini, hampir 16 tahun kemudian, teknologi yang ada sudah lebih maju. Pemanfaatan teknologi digital adalah cara untuk melindungi masyarakat di masa depan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional hari ini di tengah pandemi COVID-19, kita diingatkan tentang perlunya meningkatkan investasi teknologi digital untuk mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang dapat mencegah jatuhnya korban jiwa ketika terjadi bencana alam dan krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bencana baru-baru ini di Indonesia, seperti tsunami yang dipicu gempa di Sulawesi Tengah atau pandemi COVID-19 saat ini, mengingatkan kita untuk menggunakan analisis data dan

Simulasi perlindungan diri gempa bumi yang diajarkan bagi anak-anak sekolah dasar.

Foto: **BAZNAS**

pemetaan wilayah yang inovatif untuk menguatkan sistem pengurangan risiko bencana. Di negara di mana 8 dari 10 orang memiliki akses ke ponsel, jawaban untuk penilaian risiko di masa depan terletak pada teknologi digital dan aplikasi ponsel.

UNDP, melalui proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami/*Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance* (PETRA), bekerja sama dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW) dan Badan Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) untuk membangun kembali sarana dan



prasarana penting, serta menguatkan ketahanan masyarakat. Kami juga telah memperluas dukungan terhadap aplikasi seluler 'InaRISK' BNPB untuk membantu pemantauan selama pandemi COVID-19.

Alat tersebut, yang dikembangkan bermitra dengan BNPB, menginformasikan pengguna tentang risiko bencana alam yang akan datang, dan menyebarkan penilaian risiko bencana kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui proyek *Partnerships for Strengthening School Preparedness for Tsunamis in the Asia Pacific Region*, UNDP bersama BNPB, Kementerian Pendidikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan UNESCO bekerja sama dengan Pemerintah Jepang mengembangkan aplikasi STEP-A untuk menilai kesiapsiagaan sekolah terhadap gempa bumi dan tsunami.

Aplikasi STEP-A ini melengkapi latihan kesiapsiagaan tsunami yang diselenggarakan UNDP secara berkala di sekolah-sekolah di wilayah berisiko tinggi di Indonesia. Sistem STEP-A juga telah diintegrasikan dalam *platform* daring 'InaRISK' BNPB. Sistem STEP-A direncanakan akan menyediakan *dashboard* informasi risiko tsunami untuk sekolah di 17 negara, didukung oleh Proyek Regional untuk

Mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana dapat mencegah jatuhnya korban jiwa (atas).

Sumber: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/>
Aplikasi STEP-A yang dikembangkan melalui proyek *Partnerships for Strengthening School Preparedness for Tsunamis in the Asia Pacific Region* untuk menilai kesiapsiagaan sekolah terhadap gempa bumi dan tsunami yang dapat diunduh di <https://apkpure.com/id/step-a/org.odk.stepa.android>.

tata kelola data kebencanaan (*GCDS and Data Digitalization*). Dalam hal ini, Indonesia juga memberikan bantuan teknis kepada negara-negara tersebut bekerja sama dengan Fujitsu.

Analisis data sangat dibutuhkan saat ini dan ketersediaan data dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan terbesar untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Dengan risiko bencana alam dan pandemi yang semakin besar, kita harus meningkatkan investasi untuk mengembangkan sistem yang dapat mencegah jatuhnya korban jiwa.

Mekanisme tanggap bencana yang didukung sistem digital dalam bentuk sistem peringatan dini dapat memastikan upaya rekonstruksi bencana yang lebih efektif. Hal ini dapat mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Dengan berinvestasi dalam berbagai *platform* digital dan menciptakan sistem analitik data terpusat, kita dapat membantu mengurangi risiko bencana di masa depan dan pada saat yang sama membangun ketahanan masyarakat.



Berinvestasi dalam teknologi digital tentunya merupakan jalan ke depan dan akan membantu menciptakan unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko. Teknologi digital dapat membantu pemerintah, pembuat kebijakan - dan organisasi kemanusiaan mengatasi kekurangan manajemen risiko dan mengatasi tantangan sebelum bencana terjadi.

Selain itu, juga terbuka peluang untuk mengatasi kesenjangan gender. Solusi digital menyediakan *platform* untuk pendekatan yang inklusif karena dikembangkan untuk memastikan kebutuhan perempuan juga dipertimbangkan dalam rencana mitigasi risiko bencana.

Inovasi digital tentunya menuntut peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan akses internet secara nasional. Penggunaan teknologi digital di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Pengembangan program untuk meningkatkan literasi digital ditambah dengan perluasan konektivitas akan memberi lebih banyak orang kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana. Teknologinya telah tersedia; sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan teknologi tersebut.

Kita juga harus memastikan tidak seorangpun tertinggal. Pandemi COVID-19 telah memperparah kesenjangan, dan kemajuan teknologi pengurangan risiko bencana tidak boleh memperluas kesenjangan digital. Kita harus memastikan bahwa mereka yang paling tertinggal juga memiliki akses ke opsi digital, terutama untuk membantu mitigasi bencana. Perempuan dan kelompok masyarakat miskin adalah mereka yang paling terkena dampak bencana dan mereka harus dilindungi.

Kita harus memastikan pengurangan risiko bencana dan upaya adaptasi iklim yang lebih komprehensif; menyediakan akses ke informasi risiko bencana dan sistem peringatan dini; dan menguatkan kesiapsiagaan bencana. Digitalisasi adalah salah satu solusi untuk mengurangi risiko perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, resistensi antibiotik, dan risiko bencana lainnya.

Berbagai upaya di atas harus dilakukan secara bersama untuk menguatkan ketahanan masyarakat perkotaan dan pedesaan dan membantu Indonesia membangun dengan lebih baik di masa depan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Deputy Resident Representative UNDP Indonesia
<https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/20201/Pengurangan-risiko-bencana.html>

EMPAT STRATEGI UNTUK EKONOMI BIRU DI INDONESIA

Oleh **DINI HARIYANTI**

Dengan lebih dari 17 ribu pulau, 108 ribu kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayah berupa laut, maka laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia.

Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 miliar dollar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan. Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam. Terumbu karang dan mangrove mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya 639 juta dollar AS per tahun.

Akan tetapi, terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas laut Indonesia, berbagai tantangan masih terus mengancam manfaat yang dapat diperoleh dari sektor kelautan. Sekitar 38 persen



dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya (*overfishing*), sebagian besar armada penangkapan ikan domestik berskala kecil (lebih dari 600.000 kapal) tidak terdaftar dan tidak dipantau. Sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik. Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia, dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dollar AS per tahun.

Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekonomi laut yang berkelanjutan, atau 'ekonomi biru'.

Laporan Bank Dunia terbaru yang berjudul Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk



Sumber foto (tangkapan layar) : <https://www.youtube.com/watch?v=ShTeK2JWgI0>

Ekonomi Biru di Indonesia, menjelaskan tentang status, tren, dan peluang menuju ekonomi biru di Indonesia. Dalam laporan tersebut, rekomendasi disajikan berdasarkan upaya dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan tersebut juga memaparkan bahwa masa depan sektor kelautan bergantung kepada aset alam – ekosistem laut dan pesisir – yang sehat.

Berikut adalah usulan empat strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru sebagai berikut.

Peningkatan Pengelolaan Aset Laut Dan Pesisir

Aset laut dan pesisir dalam hal ini mencakup perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat

panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai.

Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem 'scorecard' dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan, dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya



pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir (*spatial title registry*) guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir.

Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang 'berbasis hak', yang menopang praktik-praktik terbaik di sektor perikanan di dunia. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan hak panen kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pantai atau memberikan hak panen kepada perusahaan hingga jumlah tertentu dalam batas panen. Pengaturan seperti ini menjadikan para nelayan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan, mendorong pengelolaan yang baik, dan meningkatkan produktivitas.

Indonesia dapat melengkapi target restorasi mangrove yang ambisius - 600 ribu hektar pada tahun 2025 - dengan kegiatan konservasi yang lebih kuat. Kegiatan restorasi perlu dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mengurangi dan pada akhirnya dapat menghentikan kehilangan hutan mangrove alami. Perluasan moratorium konversi hutan primer yang juga meliputi mangrove akan sangat bermanfaat; Indonesia dapat mulai merancang diterapkannya pembayaran berbasis hasil untuk karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah dari hutan

mangrove yang luas, dan memastikan manfaat ini mencapai masyarakat pesisir untuk memberikan insentif bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Mobilisasi Insentif dan Investasi

Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan. Investasi yang dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi (Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, 2020).

Akan tetapi, infrastruktur semata tidak dapat mengatasi masalah sampah. Dalam jangka panjang, ekonomi biru Indonesia akan membutuhkan ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal. Upaya ini meliputi kebijakan yang menaikkan harga plastik, insentif bagi inovasi dan daur ulang, dan perubahan perilaku untuk mengurangi penggunaan plastik. Peraturan Pemerintah mengenai Perluasan Tanggung Jawab Produsen dapat dilengkapi dengan sistem pengembalian



Sumber foto (tangkapan layar) : <https://www.youtube.com/watch?v=5fTeK2JWg0>

sektor kelautan. Sistem pengelolaan kunci- seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan-dapat diuji dan diterapkan saat ini, ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan seraya memperkuat ketahanan pesisir, antara lain melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove dan pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, dan investasi pada infrastruktur desa yang dibutuhkan.

Pada akhirnya, laporan ini mengingatkan kita bahwa potensi ekonomi biru Indonesia bukanlah sekadar jargon, melainkan merupakan serangkaian langkah nyata yang dapat ditempuh dengan kapasitas dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan strategi ekonomi biru melalui berbagai jenis investasi, seperti Program Lautan Sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-investasi selama 20 tahun bagi pengelolaan dan penelitian terumbu karang, serta Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), yakni sebuah *platform* untuk perencanaan dan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bank Dunia juga memberikan dukungan teknis melalui Indonesia *Sustainable Oceans Program*, melengkapi upaya peningkatan kapasitas dan basis pengetahuan terkait ekonomi biru. Melalui berbagai upaya di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan mendatang.

deposit, standar untuk bahan daur ulang, persyaratan kandungan daur ulang minimum, dan memprioritaskan bahan daur ulang dalam pengadaan publik.

Sistem yang Lebih Baik Untuk Pengumpulan dan Pemantauan Data

Bentang laut Indonesia yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik. Kesepakatan tentang metode yang konsisten dalam konteks pemantauan ekosistem dan berbagai data juga diperlukan. Data yang lebih baik akan menguntungkan sektor pariwisata. Pemantauan dampak lingkungan dapat diperluas ke destinasi wisata populer untuk mendeteksi masalah dan menyediakan informasi dalam pengambilan langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu.

Membangun Kembali Dengan 'Lebih Biru' Setelah Pandemi COVID-19

Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek pasca COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang di

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari:

https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/empat-strategi-untuk-ekonomi-biru-di-indonesia-refleksi-dari-laporan-laut-untuk?cid=eap_tt_indonesia_id_ext

BENDERA PENYELAMAT IBU & ANAK SINOA

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Tantangan dalam hal kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di negara Indonesia. Setiap tiga menit, di suatu tempat di Indonesia, anak di bawah usia lima tahun meninggal. Selain itu, setiap jam seorang perempuan meninggal karena melahirkan atau sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan (UNICEF, 2012). Sampai saat ini telah banyak program-program pembangunan kesehatan di Indonesia yang ditujukan guna menanggulangi masalah-masalah kesehatan ibu dan anak (Maas, 2004).

Pemerintah Kabupaten Bantaeng, turut merespons tantangan ini. Program Bendera SASKIA sebuah Inovasi dari Puskesmas Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. SASKIA singkatan dari Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak, merupakan bendera penanda yang diberikan pada sasaran kesehatan ibu dan anak.



Sebelum inovasi ini lahir, sasaran kesehatan ibu dan anak sangat sulit terpantau. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu tanda atau simbol bahwa di rumah tersebut ada sasaran kesehatan ibu dan anak karena petugas terkadang tidak menemukan lokasi rumah sasaran saat berkunjung. Di sisi lain keluarga, masyarakat dan pemerintah desa kurang peduli terhadap status kesehatan dari sasaran kesehatan ibu dan anak. Akibatnya pada tahun 2016 ada 18% ibu hamil persalinannya ditolong oleh dukun beranak (data cakupan program kesehatan ibu dan anak Puskesmas Sinoa), status kesehatan ibu hamil tidak terkontrol secara berkala, masih ada bayi yang belum memperoleh



imunisasi dasar lengkap, dan masih ada balita dengan status gizi kurang.

Data cakupan Puskesmas Sinoa tahun 2016 menunjukkan bahwa persalinan yang ditolong oleh dukun beranak sebesar 18% (40 dari 222 ibu bersalin), ibu bersalin yang dilakukan di rumah sebesar 13,6% (192 dari 222 ibu bersalin), yang tidak memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 12,8% (219 dari 251 bayi), masih ada balita gizi kurang sebanyak 22 orang.

Bendera SASKIA ini dipasang oleh bidan dan kader posyandu yang terdiri dari 4 warna untuk ibu hamil yaitu warna hijau, biru, merah muda, merah tua, 1 warna untuk bayi yaitu kuning dan 1 warna untuk balita yaitu ungu.

Setelah inovasi Bendera SASKIA diimplementasikan telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak karena sasaran dengan mudah ditemukan oleh petugas kesehatan yang berkunjung sehingga sasaran KIA terpantau secara kontinyu.

Bendera dipasang di pagar rumah, sehingga mudah dilihat oleh siapapun, khususnya ibu hamil risiko tinggi dan balita gizi kurang akan mendapatkan kunjungan pemantauan status



Sumber foto : Dok. Puskesmas Sinoa

kesehatannya sekali seminggu dari petugas kesehatan serta melakukan tindakan rujukan bila diperlukan.

Di awal inovasi tahun 2017, lokus diimplementasikan di 2 desa (Bonto Bulaeng dan Bonto Maccini), dengan pertimbangan kedua desa tersebut paling tinggi kasus kesehatan ibu dan anak. Selama kurang lebih enam bulan berjalan, terjadi peningkatan cakupan pelayanan program kesehatan ibu dan anak khususnya ibu hamil, bayi dan balita.

Pada tahun 2018 dilakukan pengembangan lokus pada 4 desa lainnya (Bonto Tiro, Bonto Karaeng, Bonto Majannang dan Bonto Mate'ne) yang memiliki masalah yang sama terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak. Inovasi ini juga cukup mudah untuk direplikasi karena hanya menggunakan bendera sebagai penanda serta membutuhkan komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah desa.

Inovasi ini juga melibatkan tenaga bidan. Sampai saat ini setiap dusun memiliki satu

bidan desa yang berstatus non ASN. Penempatan bidan desa ditetapkan sesuai domisili. 90% bidan mengabdikan diri di kampungnya sendiri. Selebihnya direkrut dari luar. Bidan-bidan ini ditugaskan memperhatikan orang-orang dan kondisi kesehatannya melalui penanda bendera SASKIA.

Setelah inovasi Bendera SASKIA diimplementasikan telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak karena sasaran dengan mudah ditemukan oleh petugas kesehatan yang berkunjung sehingga sasaran KIA terpantau secara kontinyu. Inovasi ini pula, turut menumbuhkan kepedulian dari keluarga, masyarakat dan pemerintah desa terkait status kesehatan ibu dan anak.

Pada tahun 2019, data cakupan di Puskesmas Sinoa menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2017 sebesar 93,3 %, pada tahun 2018 meningkat 6,7% sehingga menjadi 100% dan bertahan hingga kini. Kemudian pada persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan pada tahun 2017 sebesar 42,3%, pada tahun 2018 meningkat pesat sebesar 100% dan bertahan di tahun berikutnya, tetap mempertahankan *zero* kematian ibu dan bayi.

Bendera SASKIA

Sisi inovatif dari inovasi ini adalah digunakannya bendera sebagai penanda sasaran kesehatan ibu dan anak yang dikibarkan di rumah-rumah warga.

Selama ini penanda status kesehatan itu berupa stiker yang ditempel di dinding rumah warga. Namun stiker tidak dapat digunakan berulang, sedangkan penggunaan bendera sebagai penanda selain lebih mudah terlihat karena ditempatkan pada pagar rumah atau bagian depan rumah, bendera ini juga dapat digunakan berulang serta dapat digunakan pada sasaran lainnya setelah masa pemantauannya selesai.

Inovasi Bendera SASKIA telah membawa Kabupaten Bantaeng menjadi satu-satunya kabupaten dan inovasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) tahun 2020. Lomba Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

6 Jenis warna Bendera SASKIA



Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, diikuti oleh sejumlah kementerian, lembaga, provinsi, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Sebelumnya, Bendera SASKIA juga memperoleh penghargaan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yakni Top 30 inovasi pelayanan Publik SulSel dan menerima Indonesia Award 2020 oleh Inews TV.

Dari inovasi ini kita belajar bahwa sebuah inovasi yang baik tidak selalu harus *sophisticated/canggih*. Meskipun terlihat sederhana dalam pelaksanaannya namun yang terpenting adalah daya ungkit dan dampak yang dihasilkan

Persoalan *mindset*, kebiasaan lama ataupun budaya boleh jadi menjadi tantangan di awal pelaksanaan inovasi namun dengan pendekatan persuasif, kolaborasi dan kemitraan oleh semua pemangku kepentingan, tantangan dapat ditaklukkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang inovasi ini dapat menghubungi: **H. Iwan Setiawan, SKM., M.Kes** (Kepala Puskesmas Kec. Sinoa). Email: nur.imaniah26@gmail.com



Mengkomunikasikan Perlindungan Sosial di Papua Barat

Oleh **LUNA VIDYA MATULESSY**

Apa yang Terjadi Ketika Kemiskinan Menggerogoti Kehidupan Individu?

Ada banyak sudut pandang terhadap kemiskinan, akibat serta pendekatan terhadap persoalan kemiskinan, tapi beberapa hal dapat diikhtisarkan dari berbagai sumber. Pada dasarnya, kemiskinan membuat individu itu tidak mampu membuat keputusan untuk menghampiri, mendapatkan haknya atas hidup bermartabat dan



Posisi sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, menegaskan mengapa gagasan perlindungan sosial dibutuhkan terimplementasi di Papua barat. Tapi apakah semata karena upaya pengentasan kemiskinan?

pendekatan yang dilakukan lewat kumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Masih dari sumber buku yang sama, terdapat keterangan: "... pada tahun 2009 *United Nations* (UN) meluncurkan *Social Protection Floor Initiative* (SPF-I). Landasan perlindungan sosial pada sebuah negara setidaknya harus mencakup empat pokok hal penting: jaminan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial pokok lainnya; jaminan keamanan pendapatan dasar bagi anak-anak dengan tujuan untuk memfasilitasi akses terhadap nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya; jaminan keamanan pendapatan untuk penduduk usia aktif yang tidak mampu memperoleh pendapatan yang diperlukan; serta jaminan keamanan pendapatan untuk penduduk berusia lanjut."

Upaya inilah yang sedang berproses di Papua Barat, dengan menjadikan Kabupaten Sorong, Manokwari Selatan, Fakfak dan Kaimana sebagai kabupaten uji coba. Upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat melindungi masyarakat pribumi Papua dari risiko kerawanan sosial, dengan skema bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

Relevansi dan Signifikansi Program Perlindungan Sosial di Papua Barat

Data Badan Pusat Statistik per Maret 2020, terkait 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi

sejahtera. Kemiskinan menempatkan kelompok usia tertentu seperti anak-anak dan orang berusia lanjut tidak potensial, dalam posisi rawan.

Mengapa Demikian?

Karena keputusan atas kesejahteraan hidup mereka, tidak berada dalam kendali mereka tapi pada pihak pemelihara. Ini memberi pengertian bahwa kemiskinan tidak berhenti pada satu orang, tapi memengaruhi orang lain dalam lingkaran keputusan individu tersebut.

Dalam buku *Perlindungan Sosial dan Arahnya ke Depan* yang diterbitkan Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/BAPPENAS (2014), upaya perlindungan sosial, didefinisikan sebagai



Foto: Syaifulah/Nayasan BaKTI

menempatkan Provinsi Papua Barat di deret ke dua teratas: 26,3 %.

Posisi sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, menegaskan mengapa gagasan perlindungan sosial dibutuhkan terimplementasi di Papua Barat. Tapi apakah semata karena upaya pengentasan kemiskinan?

Melalui desain Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) upaya untuk mengurangi persentasi kemiskinan di Papua Barat, merupakan pintu masuk ke pada hal-hal lain: pertama, mendukung kesehatan anak dan mengurangi kekerdilan (*stunting*) akibat kemiskinan. Ke dua, tanpa menafikan kuatnya ikatan kekerabatan di tengah masyarakat pribumi Papua dan penghargaan kepada para lanjut usia (lansia) di tengah keluarga besar, program Perlinsos ini juga akan membuat lansia dapat mandiri dalam keuangan, dengan demikian dapat mempertahankan kesehatannya. Hal pertama dan ke dua, sangat berkaitan dengan sifat dari program, yang salah satunya adalah menyasar Orang Asli Papua (OAP) dalam dua kelompok usia ini, anak 0-6 tahun serta lansia 60 tahun ke atas, sebagai calon penerima manfaat. Selain itu, program juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi di

Di Papua Barat, telah dibangun sebuah Sistem Administrasi dan Informasi berbasis Kampung (SAIK) selama beberapa tahun terakhir (sejak tahun 2018). Aplikasi SAIK+ (SAIK Plus) ini memuat data yang dibutuhkan untuk membuat Program Perlindungan Sosial Papua Barat ini diterima oleh orang yang tepat, terverifikasi dan tervalidasi.

tingkat masyarakat, sebuah keniscayaan ketika ada dana tunai di tangan masyarakat, untuk dibelanjakan. Mengurangi kemiskinan serta tiga kesempatan emas perlindungan sosial bagi target program, masih berpotensi bonus perbaikan pendataan dan peningkatan pemilikan dokumen kependudukan Provinsi Papua Barat, terutama di empat kabupaten uji coba. Sebab dalam perencanaannya Program

Perlinsos ini mensyaratkan dokumen kependudukan bagi calon penerima manfaatnya.

Berikut karakteristik dari Program Perlinsos ini: menyoar seluruh OAP dengan kriteria usia (0-6 tahun dan 60 tahun ke atas); Dana tunai disalurkan melalui lembaga keuangan/ perbankan; Untuk anak-anak dana tunai disalurkan melalui rekening ibu; Pemanfaatan dana untuk peningkatan gizi anak dan dukungan pendidikan usia dini; Pemanfaatan dana untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan orang lanjut usia.

Optimisme Sinergitas Dua Kaki

Syarat kepemilikan dokumen kependudukan dalam kepesertaan Program Perlinsos, merupakan tantangan besar bagi provinsi di Tanah Papua. Tapi tantangan ini optimis dapat diminimalisir di Provinsi Papua Barat, karena Program Perlinsos ini tidak harus mulai dari nol.

Di Papua Barat, telah dibangun sebuah Sistem Administrasi dan Informasi berbasis Kampung (SAIK) selama beberapa tahun terakhir (sejak tahun 2018). Aplikasi SAIK+ (SAIK Plus) ini memuat data yang dibutuhkan untuk membuat Program Perlindungan Sosial Papua Barat ini diterima oleh orang yang tepat, terverifikasi dan tervalidasi. Pendataan berbasis kampung di Papua Barat ini, menjadi tulang belakang bagi Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek). Seperti Program Perlinsos, Prosppek juga bersumber dari dana Otsus Papua Barat. Telah hadirnya informasi kependudukan berbasis kampung ini, merupakan dasar optimisme Provinsi Papua Barat dalam mengimplementasi Program Perlinsos bagi masyarakat orang asli Papua. Setidaknya ada total 60 variabel data tersedia yang mencakup informasi bersesuaian dengan karakteristik Program Perlinsos telah terekam dalam sistem informasi SAIK+ dan dapat dimanfaatkan untuk Program Perlinsos. Berdasarkan data per April 2020, dari total 49.565 jiwa di Kabupaten Manokwari Selatan (12.601 jiwa), Sorong (2.325 jiwa), Fakfak (33.153 jiwa) dan Kaimana (1.486

jiwa), mencakup data terpilah OAP dan Non-OAP, terpilah jenis kelamin dan umur, disabilitas, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, pekerjaan hingga data garis keturunan: bapa, mama, dan nama keluarga besar.

Tentu saja, tidak harus dipungkiri, di depan akan dibutuhkan sinkronisasi data antara SAIK+ dan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik provinsi mau pun kabupaten, proses yang akan merupakan kerja panjang dan membutuhkan kordinasi solid antar pihak yang terlibat.

Pekerjaan Rumah

Sinkronisasi data antara SAIK+ dan Dukcapil Papua Barat pada semua level, bukan satu-satunya dinamika yang perlu dilewati dalam implementasi Program Perlinsos di depan. Ada beragam tantangan yang perlu ditemukenali lebih lanjut dan dikomunikasikan secara strategis. Sederet pekerjaan rumah menanti, misalnya: pentingnya mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk membuat setiap elemen dalam organisasi bekerja secara efektif, menggairahkan kordinasi yang berkualitas antar pihak dalam program. Memastikan masyarakat secara umum, para calon penerima manfaat dan mereka yang menjadi wali kepentingan bagi anak 0-6 tahun, mempunyai informasi yang lengkap, jelas tentang apa, kenapa, untuk apa dana bantuan tunai langsung Program Perlinsos. Pekerjaan rumah yang besar dan untuk setiap pihak ada bagian yang harus dikontribusikan.

Tapi kenapa tidak? Tantangan yang kita lihat hari ini, mungkin adalah benih narasi perubahan di depan.

Harapannya, menuju perubahan itu catatan-catatan tentang upaya menyelesaikan bersama-sama pekerjaan rumah di atas, adalah bagian membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Perlindungan Sosial di Papua Barat dapat menghubungi dapat menghubungi info@bakti.or.id

MEREKA YANG TIDAK TERCATAT: RAPUHNYA PONDASI PENCATATAN SIPIIL DI INDONESIA

Oleh **TIM PUSKAPA**

Setelah enam tahun menikah, Bunga (bukan nama sebenarnya), 20 tahun, warga sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan baru menyadari pentingnya memiliki buku nikah yang membuktikan perkawinannya diakui oleh negara.

Perkawinan Bunga tidak dicatatkan karena dia dinikahkan ketika masih berusia 14 tahun, yang dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia belum diperbolehkan untuk menikah. Oleh karena itu, Bunga dan suaminya harus menikah di bawah tangan dan tidak dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tanpa buku nikah, Bunga tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), dan suaminya saat ini menghilang. Orang tua Bunga yang miskin juga tidak memiliki KK. Tanpa buku nikah dan KK, anak Bunga yang berusia 2 tahun Rara (bukan nama sebenarnya) belum juga memiliki akta



Foto: Yusuf Ahmad/KOMPAK

kelahiran. Akibatnya, baik Bunga dan Rara belum bisa mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan gratis oleh pemerintah. Mereka juga tidak bisa mengakses bantuan sosial apapun selama pandemi karena belum tercatat.

Keluarga Bunga adalah satu dari empat rumah tangga dengan anak di bawah usia lima tahun di Indonesia yang harus menderita karena belum tercatat dan keberadaannya belum diakui secara hukum oleh pemerintah.



Bisa jadi masalahnya bertumpu pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

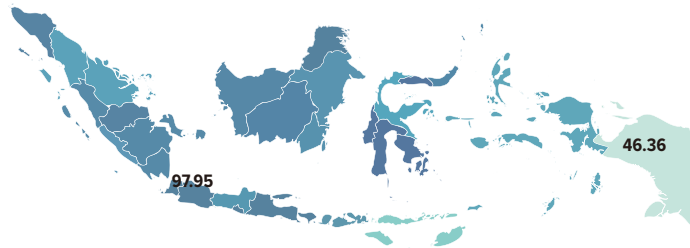
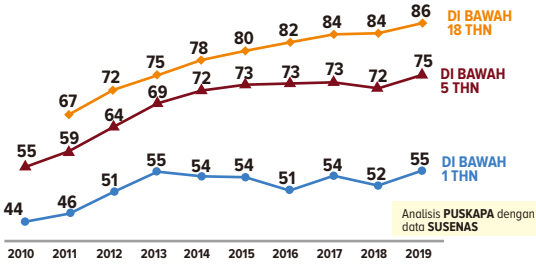
Namun penelitian kami dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) menunjukkan adanya masalah yang lebih sistematis yang berkaitan dengan sistem administrasi kependudukan pemerintah yang tidak bisa dijangkau oleh orang miskin dan komunitas rentan, seperti orang dengan disabilitas.

Kesenjangan Ekonomi

Analisis PUSKAPA terhadap data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 menyebutkan bahwa 14% anak usia di bawah 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Jumlah proporsinya naik hingga 25% untuk anak-anak berusia di bawah 5 tahun dan 45% untuk anak-anak di bawah 1 tahun.

Temuan lainnya menunjukkan jumlah anak di bawah 18 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran dari keluarga kaya hanya berkisar 5%,

PROPORSI (%) KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI INDONESIA



PROPORSI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (%)
97.95 46.36

sedangkan untuk kelompok umur yang sama dari keluarga miskin, jumlahnya mencapainya 23%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi menjadi satu masalah dalam sistem pencatatan kependudukan pemerintah.

Tidak adanya biaya transportasi untuk mencapai kantor pencatatan sipil terdekat menjadi salah satu kendala yang dihadapi keluarga miskin. Penjelasan lebih lanjut mengenai hambatan akses ini akan kami jelaskan lebih lanjut dalam artikel kedua.

Selain itu, kami juga menemukan bahwa angka kepemilikan akta kelahiran berbeda antara wilayah kota dan desa.

Proporsi anak yang tidak memiliki akta kelahiran lebih tinggi di wilayah pedesaan (18%) dibandingkan perkotaan (10%).

Di data terakhir, sekitar 54% anak di Papua ditemukan tidak memiliki akta kelahiran, sementara proporsi anak di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang punya akta kelahiran mencapai 98%.

Penelitian PUSKAPA tahun 2016 menunjukkan beberapa penduduk Langkat, Sumatera Utara, harus menempuh perjalanan sampai tiga jam sekali jalan untuk mencapai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus akta kelahiran.

Meskipun pemerintah sudah berupaya untuk menyederhanakan dan mendekatkan layanan pencatatan sipil ke penduduk, pelaksanaannya tetap tidak mudah karena belum optimalnya kapasitas, infrastruktur, dan fasilitas pendukung. Misalnya, masih ditemukan masalah kurangnya blangko KTP elektronik dan ketiadaan komputer atau alat cetak di lokasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Tidak Peka Terhadap Kelompok Rentan

Tidak hanya penduduk miskin, penduduk rentan lainnya juga terancam tidak tercatat.

Studi PUSKAPA bersama kemitraan antara Indonesia dan Australia untuk program-program yang mendukung nilai-nilai keadilan (AIP) tahun 2014 mengungkapkan anak-anak dengan orang tua atau pengasuh tanpa disabilitas fisik memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibanding yang orang tua atau pengasuhnya punya disabilitas.

Lokasi pengurusan yang tidak ramah pada penyandang disabilitas serta proses pengurusan yang rumit menjadi hambatan bagi orang dengan disabilitas untuk mengurus dokumen kependudukan.

Pada tahun 2016, PUSKAPA bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melakukan studi serupa di wilayah berbeda juga menemukan bahwa kemungkinan kepemilikan akta kelahiran lebih besar seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan terakhir pendaftar.

Mereka yang berpendidikan tinggi diasumsikan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan untuk memastikan anak mereka bersekolah.

Dampak pada Hak Warga

Saat ini, ada sekitar 17 layanan publik yang mengharuskan adanya dokumen identitas hukum sebelum penduduk bisa mengaksesnya. Selain sekolah, asuransi kesehatan, layanan peradilan, layanan perbankan, transportasi, air bersih, dan listrik juga mengharuskan pendaftar untuk menunjukkan dokumen-dokumen tersebut.



Foto: Yusuf Ahmad/KOMPAK

Studi kami tahun 2016 menunjukkan bagaimana ketiadaan satu dokumen memengaruhi absennya dokumen identitas hukum yang lain, sama seperti yang dialami Bunga.

Tidak hanya dalam situasi biasa, pencatatan sipil juga menjadi acuan mutlak penerima bantuan saat dan paskabencana.

Penyaluran bantuan tunai pemerintah untuk membantu korban gempa Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dan Sigi, Sulawesi Tengah, beberapa waktu yang lalu terhambat karena tidak semua penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan bersamaan dengan KK dan Akta Kelahiran.

Pembenahan sistem administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya pencatatan sipil dan pengelolaan data penduduk adalah pondasi penting dalam mendukung terlaksananya berbagai program pemerintah secara adil dan tepat.

Belum tercatatnya penduduk dalam sistem bisa membuat program mengalokasikan anggaran dan merencanakan layanan dengan kurang tepat. Ketiadaan dokumen identitas hukum bisa membuat penduduk sulit membuktikan siapa mereka dan apa yang berhak mereka dapatkan.

Sampai pemerintah menjamin pencatatan setiap penduduknya, Bunga dan penduduk rentan lainnya belum terlindungi hak-haknya secara menyeluruh.

Studi-studi dan program yang berkaitan dengan artikel ini terselenggara atas kerja sama PUSKAPA dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dukungan Pemerintah Australia lewat program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Sebelumnya, studi terkait juga didukung oleh AIPJ (Kemitraan Indonesia-Australia untuk Keadilan)

Widi Sari, *Lead for Research, Monitoring and Evaluation*, PUSKAPA

Harriz Jati, *Knowledge Manager*, PUSKAPA

Meutia Aulia Rahmi, *Research and Advocacy Associate*, PUSKAPA

Santi Kusumaningrum, *Director, Center on Child Protection and Wellbeing* (Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak), PUSKAPA

Artikel ini bersumber dari

<https://theconversation.com/mereka-yang-tidak-tercatat-rapuhnya-pondasi-pencatatan-sipil-di-indonesia>

Dana Desa untuk Pelestarian Lingkungan di Papua

Oleh **WAHYUDIN OPU**

A

wal tahun 2014 lalu Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lewat undang-undang ini desa diberikan kewenangan yang sangat besar untuk merancang dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Kewenangan ini tentu didukung pula dengan gelontoran Dana Desa yang sangat besar.

Penetrasi kegiatan di tingkat desa langsung terlihat signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Desa. Di Papua sendiri kegiatan yang didanai Dana Desa banyak diarahkan pada bidang pembangunan fisik desa atau kampung. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat.

Sebenarnya tidak ada masalah pada penerapan penggunaan Dana Desa yang berfokus pada bidang pembangunan fisik. Toh tujuan penataan desa yang termuat dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Desa adalah untuk “meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum.” Tapi pertanyaannya adalah sudahkah tujuan tersebut tercapai?



Guna membangun kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung di Papua tidaklah sesederhana proses pengadaan sarana dan prasarana. Belajar dari pengalaman berinteraksi dan mendengar secara langsung, masyarakat di kampung-kampung di Papua membutuhkan pembangunan yang sesuai dengan konteks ke-Papua-an mereka. Bukan sekadar konsep adiluhung dari luar namun asing bagi mereka. Secara geografis, sebagian besar kampung di Papua terletak di dalam atau bersisian dengan kawasan hutan. Hal ini membuat masyarakat sangat bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan.

Ada satu frasa masyhur yang menjelaskan hubungan antara masyarakat Papua dengan



yaitu “hutan adalah ibu.” Maksudnya, hutan bagi masyarakat adat Papua adalah ibu yang menyediakan makan dan kebutuhan lainnya bagi mereka. Kerusakan hutan adalah ancaman serius bagi penghidupan masyarakat Papua.

Selain itu hutan juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat adat Papua. Pada banyak tempat di kawasan hutan terdapat situs-situs sejarah-budaya leluhur yang dikeramatkan oleh masyarakat. Hutan dan masyarakat adat Papua telah membentuk pola hubungan saling membutuhkan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hutan memberi penghidupan pada masyarakat adat. Sebaliknya, berbagai bentuk praktik kearifan lokal masyarakat adat

berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Membangun Kampung Lestari

Kampung-kampung dengan kondisi ekologi dan sosial-budaya seperti yang dijelaskan di atas merupakan kampung yang masih dalam fase konservatif. Hal ini berarti kampung-kampung tersebut masih memiliki sistem ekologi maupun sosial-ekonomi yang masih terjaga keasliannya, belum pada fase perubahan. Namun bisa saja status tersebut berubah dengan segala tekanan yang terjadi saat ini, berupa modernitas, pesatnya pembangunan dan semakin terbatasnya sumber daya.

Guna menjaga kelestarian alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Papua, sebaiknya



program pembangunan kampung khususnya yang menggunakan Dana Desa diarahkan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan adalah prasyarat bagi masyarakat adat Papua untuk menuju kesejahteraan, seperti yang menjadi tujuan lahirnya Undan-Undang Desa.

Berbagai kegiatan dapat didorong dengan memanfaatkan Dana Desa untuk membangun kampung lestari. Pemerintah kampung dan pendamping kampung dapat mengintegrasikan konsep kampung lestari ke dalam bidang-bidang pembangunan yang tersedia, terutama pada bidang pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang pembangunan kampung misalnya, Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi masyarakat untuk membangun rumah hunian secara mandiri. Maksud mandiri di sini adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia di hutan sekitar kampung. Dalam tradisi banyak kampung di Papua, masyarakat adat memiliki desain dan teknik arsitektur rumah tradisional masing-masing. Konsep rumah tradisional yang telah dipakai secara turun-temurun tersebut tentu menyesuaikan dengan ketersediaan bahan lokal dan corak iklim setempat. Desain arsitekturnya juga dirancang untuk tahan dalam menghadapi ancaman bencana, seperti banjir air rob dan gempa bumi.



Kita ambil contoh di Kabupaten Asmat, Papua. Bahan utama pembangunan rumah tradisional di sana berupa kayu diambil dari pohon yang tumbuh di ekosistem pesisir dan rawa. Atap rumah yang terbuat dari daun sagu (*Metroxylon sagu*) atau daun nipah (*Nypa fruticans*) dapat diambil secara cuma-cuma di dusun atau kawasan hutan milik keluarga. Tentu dengan pemanfaatan tebang pilih, hanya mengambil bahan yang memang sudah siap untuk digunakan. Desain arsitekturnya berupa rumah panggung dimaksudkan untuk mengantisipasi siklus pasang air laut yang terjadi setiap akhir hingga awal tahun.

Dalam penyediaan hunian masyarakat dalam bentuk rumah tradisional, Dana Desa

digunakan sebagai komponen pendukung saja. Misalnya untuk pembelanjaan bahan-bahan yang tidak tersedia di kampung. Dengan begitu masyarakat didorong untuk lebih mandiri dalam menyediakan hunian bagi keluarganya. Selain itu masyarakat adat juga bisa jadi lebih percaya diri karena konsep yang mereka usung secara turun-temurun diakui dan dipakai dalam proses pembangunan kampungnya.

Dana Desa juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum yang betul-betul dibutuhkan dan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya pengelolaan embung alam dan perawatan jalur transportasi sungai dan laut. Pengelolaan embung alam secara lestari akan menjamin kebutuhan masyarakat akan air bersih dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeliharaan ekosistem di sekitar embung, menjaga tidak terjadi pencemaran di sekitar penampungan air. Dengan begitu kelestarian lingkungan ekosistem embung dapat tetap terjaga dan memastikan kualitas air tetap dalam keadaan baik.

Kegiatan perawatan jalur transportasi sungai dan laut juga penting untuk didanai oleh Dana Desa. Kampung-kampung di Papua yang secara geografis terletak di wilayah pesisir dan daerah aliran sungai sangat bergantung dengan fasilitas tersebut. Dana Desa dapat dipakai untuk perawatan jalur transportasi alami ini dalam hal pemeliharaan kebersihan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas. Selain itu, untuk sungai dan pesisir yang dalam kondisi terdegradasi dapat dilakukan upaya rehabilitasi untuk memulihkan kondisinya.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan, Dana Desa dapat didorong untuk membiayai penyusunan peraturan kampung (perkam) tentang perlindungan hutan dan sumber daya alam. Penyusunan perkam ini dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal atau hukum adat yang masih berlaku di kampung yang bersangkutan. Seperti kita tahu bersama, masyarakat adat di kampung-kampung di Papua masih menjalankan nilai-nilai adat, terutama dalam hal pemanfaatan dan perlindungan hutan

dan sumber daya alam. Dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam perkam, akan tercipta kepastian hukum terhadap nilai-nilai yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat.

Selain itu, kampung-kampung di Papua sangat perlu untuk membentuk suatu kelembagaan khusus yang bertugas menjaga kelestarian hutan. Di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Asmat, beberapa kampung telah membentuk yang namanya Kelompok Jaga Hutan (KJH). KJH bertugas untuk mengamankan kawasan hutan di tingkat tapak, yaitu kampung kampung per kampung. Dalam aktivitasnya, KJH melakukan monitoring dan patroli rutin untuk memantau kondisi hutan. Mereka mengidentifikasi sumber daya alam juga mencatat setiap gangguan yang berpotensi mendegradasi ekosistem hutan. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kampung untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Peran KJH sangat dibutuhkan untuk membantu tugas Polisi Kehutanan yang jumlahnya sangat tidak seimbang dengan luasan hutan Papua. Penerapan Dana Desa untuk membiayai kegiatan KJH adalah bentuk pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan begitu masyarakat adat dapat lebih berdaya dalam melindungi hutan di sekitar kampung dari berbagai macam ancaman yang akan merusak sumber kehidupan mereka.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Desa atau Kampung (BUMKam) sebagai model pengembangan ekonomi untuk diterapkan di kampung. Pengembangan BUMKam di Papua dapat difokuskan pada pengelolaan potensi sumber daya alam lokal dengan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan. Ada dua alasan mengapa hal ini mesti dilakukan. Pertama, agar masyarakat di kampung tidak terlalu kebingungan untuk mengolah dan mengembangkan sumber daya baru. Kedua, untuk memastikan keberlanjutan usaha juga kelestarian sumber daya lokal yang dimanfaatkan tersebut.

Berbagai jenis unit usaha dalam hal

pengelolaan sumber daya alam dapat dikembangkan lewat BUMKam. Sebagai contoh, beberapa kampung di kabupaten Mimika dan Kabupaten Asmat saat ini mengembangkan unit bisnis pengolahan sagu. Menjadikan sagu sebagai komoditas usaha kemasyarakatan sangat potensial karena jumlahnya sangat melimpah di kampung-kampung yang terletak di wilayah pesisir dan dataran rendah Papua. Selain itu pengolahan sagu melalui unit bisnis BUMKam juga dapat memastikan ketersediaan pangan lokal bagi masyarakat di kampung tersebut dan kampung sekitarnya.

Pengembangan pangan lokal sangat potensial dikembangkan melalui BUMKam. Selama ini berbagai potensi pangan lokal (termasuk pangan hutan) di Papua tidak termanfaatkan dengan baik karena dominasi beras. Padahal tiap lanskap di Papua memiliki keragaman pangan lokalnya masing-masing. Selain sagu di daerah dataran rendah, masih ada ubi jalar (*Ipomoea batatas*), talas (*Colocasia esculenta*), dan gembili (*Dioscorea esculenta*) di kawasan pegunungan Papua. BUMKam menjadi peluang untuk mengarusutamakan pemanfaatan pangan lokal untuk menjaga ketahanan pangan (*food security*) di Papua.

Berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan lewat pembiayaan Dana Desa, selain untuk mendorong kelestarian hutan, adalah juga upaya untuk menguatkan peran masyarakat di tingkat kampung. Ketika kita berbicara soal pelestarian lingkungan kita tidak sedang membicarakan teknis konservasi semata. Namun ia berkelindan dengan isu sosial dan ekonomi juga. maka dari itu penting untuk mendorong isu pelestarian lingkungan yang terintegrasi ke dalam perencanaan kampung. Dengan begitu praktik penggunaan Dana Desa di kampung yang berada di kawasan hutan akan dapat lebih tepat sasaran. Dukungan Dana Desa yang besar, sekali lagi, dimaksudkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, bukan membentuk masyarakat yang konsumtif lantas melupakan akar adat dan budayanya – seperti yang banyak terjadi saat ini

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email:
wahyudinopu@gmail.com



Ilustrasi: Ichsan Djumaed

Korupsi dan Pemimpin Miskin Integritas

Oleh **HERMAN HEIZER**

Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan penangkapan Nurdin Abdullah. Penangkapan Gubernur Selatan ini menyita perhatian masyarakat luas, mengingat Nurdin Abdullah selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang cukup bersih dan berprestasi. Selama dua periode menjadi bupati, misalnya, dia mampu membawa Bantaeng menjadi kabupaten yang maju di Sulawesi Selatan. Bahkan, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin ini pernah dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi.

Penangkapan Nurdin Abdullah menambah daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 294 kepala daerah

tersandung kasus tindak pidana korupsi. 11 kasus di antaranya, terkait dengan kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Alasan lain yang membuat masyarakat kaget dengan kasus Nurdin Abdullah karena dia merupakan kaum intelektual atau akademisi. Tentu tak ada undang-undang yang melarang kaum intelektual terjun ke dunia politik. Sebab, kehadiran kaum intelektual di panggung politik diharapkan mampu memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan mampu berdiri di atas kepentingan diri sendiri dan partainya.

Menurut Amien Rais (2008), salah satu ciri yang sama di antara para intelektual adalah mereka mampu keluar dari kungkungan masyarakat, memiliki pandangan kemanusiaan universal, tidak segan-segan membedah kebusukan kekuasaan politik dan ekonomi mereka sendiri. Mungkin dapat dikatakan bahwa kaum intelektual ini mewarisi tradisi kenabian.

Namun, fakta justru berkata lain. Tidak sedikit kaum intelektual yang menggadaikan integritasnya untuk kepentingan sesaat. Bukannya mengabdikan pada kepentingan rakyat, mereka malah menjadi diktator dan bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mungkin persoalan ini yang dikhawatirkan oleh Edward Said bahwa kekuasaan selalu membius kaum intelektual. Seorang intelektual harus selalu menjaga jarak agar tidak jatuh terperangkap dalam kekuasaan.

Tentu saja kita boleh tak bersepakat dengan pendapat Edward Said, karena tidak semua kaum intelektual yang masuk ke dunia politik menjadi koruptor semua. Masih banyak kita saksikan intelektual-politisi yang berpandangan luas dan benar-benar mengabdikan pada keadilan.

Butuh Keteladanan

‘Mati satu tumbuh seribu’. Mungkin peri bahasa ini sangat cocok untuk menggambarkan persoalan korupsi di negeri ini yang sudah menjalar dari pusat hingga daerah. Tak heran jika indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat dari skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang dikeluarkan Transparency International (TI). Indonesia hanya mengantongi 37 poin, lebih

rendah tiga poin dari 2019. Dari 180 negara dunia dalam penilaian TI, IPK Indonesia bertengger di peringkat ke-102 pada 2020, selevel dengan Gambia yang punya skor sama.

Masyarakat sudah paham bahwa korupsi merupakan persoalan besar yang harus diperangi bersama. Menjamurnya korupsi itu pertanda kemunduran demokrasi dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Integritas yang seharusnya dijunjung tinggi malah digadaikan demi memperkaya diri sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Dalam konteks politik, moralitas pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting karena hal ini menjadi parameter untuk menilai apakah ia pantas atau tidak memimpin republik ini. Dengan moralitas yang dimilikinya seorang pemimpin akan mampu bertindak dan membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun partainya.

Saat ini kita mulai kehilangan keteladanan. Pemimpin yang semestinya menjadi contoh terbaik bagi rakyatnya justru berperilaku korup. Krisis moral dan keteladanan telah menggerogoti kinerja pemimpin yang lambat laun akan mengurangi kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda. Mungkin ini yang disebut banyak kalangan bahwa sebagian pemimpin kita sedang dilanda ‘miskin integritas’.

Lantas, siapa yang menjadi korban dari perilaku pejabat yang korup? Tentu korbannya adalah negara dan rakyat. Karenanya, mari kita jadikan persoalan ini sebagai pembelajaran berharga agar kasus-kasus serupa tak terulang lagi. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar berintegritas dan berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Upaya ini adalah salah satu ikhtiar menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan beradab.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Ketua Korwil Indonesia Timur BPP HIPMI dan Wakil Ketua APINDO Sulsel dan dapat dihubungi melalui email:

hermanheizer@yahoo.com



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



CEGAH PERKAWINAN ANAK DENGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Sebanyak 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, pada 2018. Bahkan 0,56 persen atau sekitar 6.838 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 15 tahun (BPS, 2019). Tingginya angka perkawinan anak merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang berakar dalam kemiskinan dan perspektif ekonomi yang terbatas, akses yang tidak memadai ke pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, dan anak yang tidak memiliki kesempatan dan ruang untuk bersuara.

Simak obrolan kami bersama Hendriyadi (Konsultan Program BERANI - UNICEF Makassar) tentang program Pendidikan Kecakapan Hidup yang didukung oleh UNICEF.



MENGINSPIRASI KTI LEWAT PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Billy Mambasar (Pendiri Yayasan Kitong Bisa) berbagi cerita bagaimana mewujudkan dan merawat mimpi anak Papua melalui Kitong Bisa. Kitong Bisa memberikan akses pendidikan dan kewirausahaan untuk anak tidak mampu di Papua dan Papua Barat.



MENYULAP JELANTAH MENJADI BIODIESEL

Di Kota Makassar setidaknya 17 ton minyak jelantah dihasilkan setiap hari dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pabrik makanan. Andy Hilmy Mutawakkil bersama GEN Oil (Garuda Energi Nusantara) berinisiatif mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel yang didistribusikan ke nelayan di pelabuhan Paotere sebagai alternatif bahan bakar perahu selain solar.

Simak diskusi kami bersama Andi Hilmy Mutawakkil (CEO GEN Oil) berbagi cerita dan pengalamannya mengelola salah satu sumber energi baru terbarukan berbasis masyarakat sekaligus melakukan upaya edukasi dan penyadaran terkait bahaya minyak jelantah dan pemanfaatannya.

Artikel

Reses Partisipatif Menjadikan Reses Lebih Efektif dan Berdampak Nyata bagi Konstituen

Reses adalah elemen penting bagi anggota parlemen karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Karena itu, reses harus berdampak pada peningkatan kinerja anggota parlemen. Reses Partisipatif merupakan salah satu metode yang diharapkan berkontribusi pada peningkatan kinerja anggota parlemen, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai konstituen kritis dan media dapat berperan sebagai penghubung konstituen dan anggota DPRD, sekaligus mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/reses-partisipatif-menjadikan-reses-lebih-efektif-dan-berdampak-nyata-bagi>

Referensi

Studi Penanganan COVID-19 di Indonesia



Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan dan respons lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 pada berbagai bidang utama, seperti kesehatan, manajemen respons, inovasi teknologi, ekonomi, pendidikan, agama, sosial-budaya, perlindungan perempuan-anak-pemuda dan perlindungan sosial. Fokus studi ini mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan, serta menghadirkan rekomendasi yang relevan bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Berbagai temuan dikemas dengan analisis yang tajam, bahasa yang concise, dan rekomendasi yang bersifat operasional.

<https://batukarinfo.com/referensi/studi-penanganan-covid-19-di-indonesia>

Berita Terbaru

Kemendes PDDT dukung Prosppek Otsus Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) mendukung Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) yang dilaksanakan Provinsi Papua Barat melalui dana otonomi khusus (Otsus)

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDDT Bito Wikantosa pada peluncuran Prosppek Otsus Papua Barat di Manokwari, Rabu, mengutarakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) desa.

Bito menjelaskan Perpres tersebut memuat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa meliputi penciptaan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, serta desa layak air bersih dan sanitasi.

<https://batukarinfo.com/news/kemendes-pddt-dukung-prosppek-otsus-papua-barat>